

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Polanharjo)

Husain Arkanuddin^{1*}, Dorothea Ririn Indriastuti²

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta^{1,2}

*Email Korespodensi: husainarka93@gmail.com

Diterima: 26-03-2025 | Disetujui: 27-03-2025 | Diterbitkan: 28-03-2025

ABSTRACT

Accountability for village financial management is important for stakeholder decision making in regional governance. This study explores the dimensions of financial accountability, the importance of transparent reporting, and compliance with standards. The aim of the research is to determine the influence of information technology, control systems and presentation of village financial reports in Polanharjo District. This research is a survey of village government officials in all Polanharjo sub-districts. The type of data used is quantitative. The data source used is primary data. The population in this research are village officials whose duties are important in managing village finances. The number of samples in this research was 126 village government officials throughout Polanharjo sub-district. The sampling and data collection technique in this research used a questionnaire. Data analysis uses multiple linear regression tests, t tests, F tests and coefficient of determination tests. The results of this research show that the use of information technology, internal control systems, and presentation of financial reports have a significant effect on the accountability of village financial management.

Keywords: *Use of information technology, internal control system, presentation of financial reports, and accountability of village financial reports.*

ABSTRAK

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa penting untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan dalam tata kelola daerah. Kajian ini mengeksplorasi dimensi akuntabilitas keuangan, pentingnya pelaporan transparan, dan kepatuhan terhadap standar. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh informasi teknologi, sistem pengendalian, dan penyajian laporan keuangan desa di Kecamatan Polanharjo. Penelitian ini merupakan survei dari aparaturnya pemerintah desa di seluruh kecamatan polanharjo. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. populasi dalam penelitian ini adalah aparaturnya desa yang bertugas dibagian yang penting dalam mengelola keuangan desa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 126 aparaturnya pemerintah desa seluruh kecamatan polanharjo. Teknik pengambilan sampel dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Analisis data menggunakan Uji regresi linier berganda, Uji t, Uji F dan Uji Koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan teknologi informasi, Sistem pengendalian internal, dan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci : Penggunaan teknologi informasi, Sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, dan akuntabilitas laporan keuangan desa.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Arkanuddin, H., & Dorothea, . D. (2025). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa(Studi Kasus pada Seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Polanharjo). PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 3284-3301. <https://doi.org/10.62710/qjvfqf82>

PENDAHULUAN

Perhatian yang dilakukan terhadap Desa di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandas dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki. (Syadeli, M. 2021).

Kasus keuangan desa di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tanpa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dana desa sering kali menjadi sasaran korupsi 9/3/2018. Menurut berita harian yang ditulis oleh Aryo Putro Saputro per tanggal 20 Mei 2024 dengan judul artikel ICW ungkap jumlah korupsi di Desa paling tinggi. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor desa menjadi penyumbang terbesar kasus korupsi di Indonesia, dengan 187 kasus tercatat pada 2023, menimbulkan kerugian negara sekitar Rp162,25 miliar. Menurut Sujarweni (2015:28). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terlihat apakah tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk dijalankan oleh Pemerintah Desa terutama ketika mengelola keuangan desa, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dana akan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Namun, perubahan terbaru dalam UU Desa, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa, berpotensi meningkatkan risiko korupsi dan menciptakan dinasti politik di tingkat desa (Katadata). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran desa. Pemerintah dan otoritas terkait harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan dana desa untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa dan mencegah praktik korupsi KOMPAS.com. Berdasarkan jumlah data dari Indonesia Corruption Wattch (IWC). Data desa yang mengalami kasus korupsi selama 3 tahun terakhir yaitu 2021-2023, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Kasus Dana Desa Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus
2021	533 Kasus
2022	576 Kasus
2023	187 Kasus
Jumlah	1.296 Kasus

Sumber : IWC Kompas.com

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kasus korupsi ditingkat desa diseluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Dari temuan mereka aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan (108 Kasus), dan utilitas (103 kasus). Jika dibandingkan dengan jumlah desa yang secara keseluruhan mencapai 75.265 desa di seluruh Indonesia, jumlah kasus korupsi yang berhasil terpantau tergolong kecil namun penting ditekankan bahwa hal ini bisa jadi merupakan kasus – kasus lain disektor desa yang belum terungkap oleh penegak hukum. Menurut ICW peningkatan korupsi di desa tidak terlepas disahnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memuat alokasi dana desa. Sebab pada tahun 2023 Pemerintah menggelontarkan anggaran sebesar Rp 68 triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia.

Dana desa yang disediakan secara nasional oleh pemerintah pusat cukup besar untuk memungkinkan adanya program /kebijakan baru. Berdasarkan data Kementrian Keangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang dianggarkan dan direalisasikan di desa – desa di Polanharjo selama tiga tahun terakhir, yaitu 2021 – 2023, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Dana Desa Tahun 2021 – 2023

Tahun	Jumlah Anggaran
2021	Rp. 1.257,515,232
2022	Rp. 2.233,603,491
2023	Rp. 4.549,795,844
Jumlah	Rp. 4.549,795,844

Sumber : Anggaran Realisasi Dana Desa Kecamatan Polanharjo.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 setiap masyarakat berhak memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Website polanharjo.klaten.go.id/compro/ diharapkan masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi publik dengan mudah, murah, cepat, efektif dan efisien. Menyajikan bahwa pelaporan anggaran realisasi dana desa dibuat oleh pemerintah desa dalam pengalokasian operasional pemerintah desa dalam pengalokasian operasional pemerintah desa dari dana desa sebesar maksimal 3% sejak tahun 2023, dana desa operasional pemerintah Desa diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana desa sebesar 3% dari total alokasi dana desa yang diberikan setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diatur dalam perundang-undangan. Tindak lanjut dari kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam

Negeri Nomor 100.3.2.3/6149/BPD perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa yang memuat kode rekening dalam siskudes.

Berdasarkan pra observasi peneliti, mengetahui beberapa desa yang ada di Kecamatan Polanharjo masih belum memenuhi perlengkapan komputer yang kurang memadai sehingga aparatur pemerintah desa kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Menurut Bapak Amirudin sebagai PLT Pelaksana Tugas Kasi / Kepala seksi tata pemerintahan mengatakan bahwa Kecamatan Polanharjo mendapatkan peringkat 3 seKabupaten klaten dalam pelaporan anggaran realisasi dana desa, namun peneliti melakukan pra observasi terdapat masalah tersebut dilapangan maka dari itu ingin memperdalam sistem pelaporan data diseluruh desa di Kecamatan Polanharjo.

Fenomena yang terjadi di atas, selain diperlukannya masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa, aparatur desa juga memperbarui informasi maupun sarana prasarana guna untuk lebih jelas dalam memberikan informasi laporan APBD Desa kepada Masyarakat.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 7 Tahun 2019 keseluruhan dari kegiatan Pemerintah Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tahap pertanggung jawaban adalah pengertian dari pengelolaan dana desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari asas yang digunakan. Menurut Sujarweni (2015: 27) pengelolaan keuangan desa menerapkan asas seperti akuntabel yaitu cara bagaimana melaksanakan kegiatan dipemerintahan secara bertanggungjawab. Salah satu jalan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah dengan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas di dalam organisasi dapat membantu meningkatkan dalam hal ketaatan pembuatan laporan keuangan yang menjadi tepat waktu pelaporan. Peran aparatur sebagai agen menjadi faktor penting dalam efektifitas pelaporan keuangan pemerintah karena akuntabilitas menjadi mekanisme aparatur penuh atas segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. Mengingat kompetensi faktor internal dan menjadi faktor penting, maka kompetensi aparatur menjadi faktor penting untuk dibahas. Terkait penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan. Aparatur desa masih sangat lemah dalam mengelola pengelolaan dana Desa dan diperlukan kompetensi yang cukup untuk menjamin keberhasilan manajemen dan integritas dalam suatu organisasi agar peran auditor internal berhasil dalam mendukung tata Kelola Pemerintahan Desa. Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangandes. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut. Salsabila,(2022)

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin laporan anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Penggunaan teknologi informasi sangat penting dalam pengelolaan dana Desa untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaan. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), elektronik *commerci*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, hal ini berbeda yang dilakukan oleh Pahlawan, Wijiyanto, Suhendro (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dibutuhkan dalam penggunaan Siskeudes untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam mengelola keuangan. Berdasarkan penelitian (Aziz, 2019) dengan adanya pengendalian internal akan menjadi cara yang tepat untuk mengatur, mengawasi serta mengukur sumber daya pada organisasi. SPIP dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah (Wahyuni, 2019). Semakin kuat sistem pengendalian internal maka kecurangan yang mungkin terjadi dapat dilakukan dengan meminimalisir dan mencegah, sebaliknya apabila pengendalian internal lemah maka kecurangan yang terjadi semakin besar (Putra, 2019).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa dan berkonsep akuntabilitas yakni mampu mempertanggungjawabkan kemana uang atau Dana Desa tersebut digunakan. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satu upaya dengan mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes, baik dari tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Penerapan Aplikasi Siskeudes memudahkan aparat desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen penatausahaan keuangan dan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Arfiansyah, 2020).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (aziz & Prastiti, 2019) dengan judul Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa yang meliputi kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah. Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab atas serangkaian program yang berada di bawahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan BPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Implikasi praktis penelitian ini bagi aparat pemerintahan adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat desa melalui pelatihan Siskeudes dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi secara teoritis, akuntabilitas keuangan sektor publik dapat pula dijelaskan melalui teori kepatuhan dan konsep etika.

Berdasarkan Pra observasi penelitian di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Tahun 2024 belum diketahui adanya Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Maka dari itu perlu tindak lanjut untuk menggali informasi mengenai keuangan di desa seKecamatan tersebut. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke perangkat Kecamatan belum ada peneliti lain serupa yang akan peneliti lakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan evaluasi tentang Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian internal, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Satu Kecamatan Polanharjo dan dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris bagi penelitian selanjutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian survei untuk menguji beberapa variabel yang saling berhubungan, antara pengaruh penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di seluruh Kecamatan Polanharjo. Alasan lokasi ini menjadi objek penelitian sekarang karena Kecamatan Polanharjo belum ditemukannya penelitian yang serupa dan ada beberapa artikel terkait isu korupsi dana desa di artikel intern.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu 126 orang perangkat Desa dari 18 Desa yang ada diwilayah kecamatan Polanharjo. Berikut ini daftar Kelurahan Se Kecamatan Polanharjo :

- | | |
|-----------------|--------------|
| a. Borongan | j. Kranggan |
| b. Glagah Wangi | k. Nganjat |
| c. Janti | l. Ngaran |
| d. Jimus | m. Polan |
| e. Kapungan | n. Ponggok |
| f. Karanglo | o. Sidoharjo |
| g. Kauman | p. Sidowayah |
| h. Kebonharjo | q. Turus |
| i. Keprabon | r. Wangen |

Penelitian ini menggunakan Teknik Purposive sampling akan dijadikan sebagai topik penelitian. kriteria sampel adalah perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, sekretaris, kepala dusun dan bendahara. sehingga diperoleh sampel sebanyak 126 sampel seKecamatan Polanharjo. Dengan kriteria sebagai berikut:

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Kadus I,II,III,IV
- Kaur Keuangan

Perhitungan jumlah sampel:

Sampel = 18 desa x 7 = 126 responden

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Ghazali,(2018). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Variabel Dependen)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi dari masing – masing variabel
 X_1 = Variabel Penggunaan Teknologi Informasi (PTI)
 X_2 = Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI)
 X_3 = Variabel Penyajian laporan Keuangan (PLK)
 e = Random Error

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskripsi variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X1)

Tabel 3 Hasil Jawaban Responden Variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X1)

No	Pernyataan	Rata - rata	Kriteria
1.	Apakah sudah efektif dalam penggunaan teknologi dalam menjalankan tugasnya	4,13	baik
2.	Seberapa besar dampak intensitas penggunaan teknologi informasi terhadap tingkat kepuasan kerja	4,17	Baik
3.	Apakah ketersediaan perangkat mampu untuk mendukung kebutuhan kinerja pegawai	4,06	baik
4.	Keahlian dalam mengoperasikan teknologi apakah dapat mempengaruhi produktivitas	4,11	baik
5.	Apakah stabilitas jaringan internet mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas	3,94	baik
RATA – RATA		4,08	baik

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil analisis deskriptif jawaban responden variabel penggunaan teknologi informasi diperoleh rata – rata 4,08. Rata – rata ini responden menilai sangat baik dalam penggunaan teknologi informasi (X1) yaitu 4,08. Rata-rata ini menunjukkan bahwa responden menyatakan baik penggunaan teknologi informasi pada desa seluruh Kecamatan Polanharjo dengan *indicator* variabel penggunaan teknologi informasi (X1) yaitu a. Penggunaan teknologi dalam menjalankan tugasnya b. Intensitas penggunaan c. Jumlah perangkat yang digunakan d. Keahlian yang Mengoperasikan e. Jaringan Internet. Nilai rata-rata tertinggi 4,17 pada *indicator* intensitas penggunaan yaitu pada item kuesioner “Seberapa besar dampak intensitas penggunaan teknologi informasi terhadap tingkat kepuasan kerja”. Nilai rata-rata terendah 3,94 pada *indicator* jaringan internet yaitu pada item kuesioner “Apakah stabilitas jaringan internet mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas”.

Analisis Deskripsi variabel sistem pengendalian internal (X2).

 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan
 Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 (Studi Kasus pada Seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Polanharjo)
 (Arkanuddin, et al.)

Tabel 4 Hasil Jawaban Responden Variabel Sistem Pengendalian Internal(X2)

No.	Pernyataan	Rata - rata	Kriteria
1	Sejauh mana lingkungan pengendalian mempengaruhi kinerja pegawai	3,65	baik
2	Seberapa penilaian resiko kegiatan dalam sistem pengendalian	3,40	baik
3	Seberapa baik anda memahami pengendalian informasi	3,62	baik
4	Seberapa baik anda memahami pengendalian komunikasi	4,22	baik
5	Sejauh mana tingkat pemantauan pengendalian internal	3,90	baik
RATA-RATA		3,76	baik

Sumber : Data diolah,2025

Hasil analisis deskriptif jawaban responden variabel sistem pengendalian internal (X_2) diperoleh rata-rata sebesar 3,76. Rata-rata ini menunjukkan responden menyatakan baik terhadap sistem pengendalian internal desa seluruh Kecamatan Polanharjo dengan indicator variable sistem pengendalian internal (X_2) yaitu a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko, kegiatan c. Pengendalian informasi dan komunikasi d. Pemantauan pengendalian internal. Nilai rata-rata tertinggi 4,22 pada *indicator* pengendalian informasi dan komunikasi yaitu pada item kuesioner “Seberapa baik anda memahami pengendalian komunikasi”. Nilai rata-rata terendah 3,40 pada *indicator* penilaian risiko kegiatan yaitu pada item kuesioner “Seberapa penilaian resiko kegiatan dalam sistem pengendalian”.

Analisis Deskripsi variabel laporan keuangan (X3)

Tabel 5 Hasil Jawaban Responden Variabel Laporan Keuangan (X3)

No	Pernyataan	Rata - rata	Kriteria
1	Apakah Penyajian laporan keuangan sudah Relevan	4,21	baik
2	Memiliki manfaat umpan balik	4,02	baik
3	Dalam penyajian laporan keuangan apakah sudah Andal	3,90	baik
4	Dalam penyajian laporan keuangan apakah dapat dibandingkan	3,63	baik
5	Apakah Penyajian laporan keuangan dapat dipahami	3,96	baik
RATA - RATA		3,95	baik

Sumber : Data diolah,2025

Hasil analisis deskriptif jawaban responden variabel penyajian laporan keuangan (X_3) diperoleh rata-rata sebesar 3,95. Rata-rata ini menunjukan bahwa responden menyatakan baik mengenai penyajian laporan keuangan desa seluruh Kecamatan Polanharjo dengan *indicator* variabel penyajian laporan keuangan (X_3) yaitu a. Relevan b. Andal c. Dapat Dibandingkan d. Dapat dipahami. Nilai rata-rata tertinggi

4,21 pada *indicator* relevan yaitu pada item kuesioner “Apakah Penyajian laporan keuangan sudah Relevan”. Nilai rata-rata terendah 3,63 pada *indicator* dapat dipahami yaitu pada item kuesioner “Dalam penyajian laporan keuangan apakah dapat dipahami”.

Analisis Deskripsi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y)

Tabel 6 Hasil Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Y)

No	Pernyataan	Rata - rata	Kriteria
1	Pemerintah desa selalu melakukan perencanaan anggaran	4,08	baik
2	Apakah sudah optimal dalam Perumusan Rencana Keuangan	4,22	baik
3	Dalam pengelolaan keuangan desa Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan harus efisien	3,46	baik
4	Melakukan evaluasi atas kinerja selama setiap semester atau triwulan	3,37	baik
5	Pelaksanaan pelaporan keuangan harus dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan	3,39	baik
RATA - RATA		3,81	baik

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil analisis deskriptif jawaban responden variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) diperoleh rata-rata sebesar 3,81. Rata-rata ini menunjukkan bahwa responden menilai baik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seluruh Kecamatan Polanharjo, dengan *indicator* variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) yaitu a. Perumusan Rencana Keuangan b. Perumusan rencana keuangan c. Pelaksanaan dan pembiayaan d. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, e. Pelaksanaan pelaporan keuangan. Nilai rata-rata tertinggi 4,22 pada *indicator* perumusan rencana keuangan yaitu pada item kuesioner “Apakah sudah optimal dalam Perumusan Rencana Keuangan”. Nilai rata-rata terendah 3,37 pada *indicator* melakukan evaluasi atas kinerja keuangan pada item kuesioner “Melakukan evaluasi atas kinerja selama setiap semester atau triwulan”.

Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengaruh tersebut bisa dilihat dari besarnya b (koefisien regresi). Jika koefisien regresi/b = 0 maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika koefisien regresi/b ≠ 0 maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Persamaan Regresi : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Y = variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a = konstanta/nilai tetap yaitu besarnya Y jika X=0

b₁ = koefisien regresi variabel X₁: menunjukkan besarnya pengaruh X₁ terhadap Y

b₂ = koefisien regresi variabel X₂: menunjukkan besarnya pengaruh X₂ terhadap Y

b₃ = koefisien regresi variabel X₃: menunjukkan besarnya pengaruh X₃ terhadap Y

X1= variabel Bebas : Penggunaan Teknologi Informasi

X2= variabel bebas: Sistem pengendalian Internal

X3= variabel bebas : Penyajian Laporan Keuangan

E= error/variabel pengganggu :yaitu variabel lain yang ikut mempengaruhi Y tetapi tidak diteliti.

Tabel 7 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	2.239	1.909		1.173	0.243
Penggunaan Teknologi Informasi (X1)	0.173	0.059	0.196	2.909	0.004
Sistem pengendalian Internal (X2)	0.406	0.063	0.469	6.446	0.000
Penyajian Laporan Keuangan (X3)	0.287	0.073	0.283	3.901	0.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Sumber : Data diolah,2025

Tabel di atas diperoleh Persamaan Regresi :

$$Y = 2,239 + 0,173 X1 + 0,406 X2 + 0,287 X3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah :

- a= 2,239 (positif)
artinya jika X1 (penggunaan teknologi informasi), X2 (sistem pengendalian internal) dan X3 (penyajian laporan keuangan) konstan maka Y (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) adalah positif.
- b1= 0,173 Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- b2= 0,406 Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- b3= 0,287 Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Uji –t

Uji –t dimaksudkan untuk menganalisis signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Ditentukan α (level of signifikansi) = 0,05 (5%)

- a) Menentukan Ho dan Ha

Ho : $\beta_i = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat

Ha : $\beta_i \neq 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Polanharjo)
 (Arkanuddin, et al.)

- b) Level Of Significance (α)= 0,05
Menentukan Level Of Significance, yaitu $\alpha = 0,05$ atau 5%
- c) Menentukan kriteria pengujian yaitu:
Ho diterima bila $p\text{-value (signifikansi)} \geq 0,05$
H0 ditolak bila $p\text{-value (signifikansi)} < 0,05$
- d) Hasil penelitian
Hasil penelitian uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Uji - T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	2.239	1.909		1.173	0.243
Penggunaan Teknologi Informasi (X1)	0.173	0.059	0.196	2.909	0.004
Sistem pengendalian Internal (X2)	0.406	0.063	0.469	6.446	0.000
Penyajian Laporan Keuangan (X3)	0.287	0.073	0.283	3.901	0.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Sumber : Data diolah,2025

- a. Uji –t Variabel X1 (penggunaan teknologi informasi)
Diperoleh nilai $p\text{-value (signifikansi)} = 0,004 < 0,05$ maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
Kesimpulan : H1 yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seluruh Kecamatan Polanharjo terbukti kebenarannya.
- b. Uji –t Variabel X2 (sistem pengendalian internal)
Diperoleh nilai $p\text{-value (signifikansi)} = 0,000 < 0,05$ maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Kesimpulan : H2 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seluruh Kecamatan Polanharjo. terbukti kebenarannya.
- c. Uji –t Variabel X3 (penyajian laporan keuangan)

Diperoleh nilai p -value (signifikansi) = $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Kesimpulan : H_3 yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seluruh Kecamatan Polanharjo terbukti kebenarannya.

Uji ketepatan model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menganalisis ketepatan model dalam memprediksi pengaruh variabel bebas yaitu X_1 (penggunaan teknologi informasi), X_2 (sistem pengendalian internal) dan X_3 (penyajian laporan keuangan) terhadap variabel terikat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut.

Formulasi Hipotesis :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu X_1 (penggunaan teknologi informasi), X_2 (sistem pengendalian internal) dan X_3 (penyajian laporan keuangan) terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) tidak tepat.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu X_1 (penggunaan teknologi informasi), X_2 (sistem pengendalian internal) dan X_3 (penyajian laporan keuangan) terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sudah tepat.

Kriteria : H_0 diterima bila p -value (signifikansi) $\geq 0,05$

H_0 ditolak bila p -value (signifikansi) $< 0,05$

Tabel 9 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	537.685	3	179.228	32.974	0.000 ^b
	Residual	663.117	122	5.435		
	Total	1200.802	125			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)						
b. Predictors: (Constant), Penyajian Laporan Keuangan (X3), Penggunaan Teknologi Informasi (X1), Sistem pengendalian Internal (X2)						

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 32,974 dengan nilai signifikansi (p value) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya berarti model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu X_1 (penggunaan teknologi informasi), X_2 (sistem pengendalian internal) dan X_3 (penyajian laporan keuangan) terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sudah tepat.

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Polanharjo)
(Arkanuddin, et al.)

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel bebas yaitu X1 (Penggunaan Teknologi Informasi), X2 (Sistem Pengendalian Internal) dan X3 (Penyajian Laporan keuangan) terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.669 ^a	0.448	0.434	2.331

a. Predictors: (Constant), Penyajian Laporan Keuangan (X3), Penggunaan Teknologi Informasi (X1), Sistem pengendalian Internal (X2)

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) untuk model ini adalah sebesar 0,434, artinya besarnya sumbangan pengaruh independen X1 (penggunaan teknologi informasi), X2 (sistem pengendalian internal) dan X3 (penyajian laporan keuangan) terhadap Y (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sebesar 43,4 %. Sisanya (100% - 43,4 %) = 56,6 % diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya Masyarakat, Sosial, Budaya dan Stabilitas Politik di Desa.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. *Pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa.*

Hasil analisis induktif menunjukan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa seKecamatan Polanharjo dengan p-value sebesar $0,04 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama menyatakan “penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan” terbukti kebenarannya.

Hal ini sesuai dengan teori stewardship yang menjelaskan bahwa memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa dengan mudah menjalankan tugasnya sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina, dkk (2021) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, pengaruh positif ini menunjukan bahwa semakin baik dalam pemerataan komputer dan juga aplikasi maka dalam pengelolaan dana desa akan lebih mudah dan lebih efisien dalam pengerjaanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2025 tentang Sistem informasi keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan dengan tata pemerintahan yang baik. Hasil penelitian Ridwan, (2023) juga sejalan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Bahwa semakin baik penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka semakin akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. *Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa*

Hasil analisis induktif menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa seKecamatan Polanharjo dengan p-value sebesar $0,00 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama menyatakan “sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan” terbukti kebenarannya.

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memberikan keyakinan terhadap pencapaian efektivitas, efisiensi dan ekonomi dalam pencapaian tujuan pemerintahan desa. Dengan sistem pengendalian sistem internal yang efektif akan menciptakan keadaan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset-aset desa dan taatnya terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku. Hasil penelitian Adriansyah *et. al* (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan agensi teori, Dimana pemerintah desa sebagai agen dalam melaksanakan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggung jawaban secara efektif dan efisien.

Teori stewardship juga mmenganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dalam melindungi, memaksimalkan kinerja organisasi dan kepentingan pemilik dengan kepuasan pemilik. Pemerintah desa direpresentasikan oleh kepala desa bertindak sebagai steward, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (Prinsipal). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik atau masyarakat desa. (Arfiansyah,2020). Teori ini juga didukung penelitian oleh Husain, Seber dan Monoarfa, (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan sistem pengendalian yang baik dilakukan oleh pemerintah desa dapat memastikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hukum dan perundang -undangan yang berlaku keandalan laporan keuangan lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga sejalan dengan Adriansyah, (2022) dan walyati, (2020) bahwa sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin baik sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa.

3. *Pengaruh penyajian laporam keungan terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa*

Hasil analisis induktif menunjukkan bahwa penyajian laporam keungan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa seKecamatan Polanharjo dengan p-value sebesar $0,00 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama menyatakan “penyajian laporam keungan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan” terbukti kebenarannya.

Teori keagenan (agency theory) sejalan dengan penelitian ini yang menjelaskan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai agent yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai principal, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Penelitian ini juga sejalan dengan teori manajemen (stewardship theory) dimana pemerintah desa harus dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik kualitatif

laporan keuanganyaitu relevan, andal, dapat dipahami,dan dapat diperbandingkan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Salsabila, (2022) dan Alviani, (2021) menyatakan bahwa sistem penyajian laporan keuangan sangat berpengaruh kepada akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana desa.

Penelitian yang dilakukan Nurjanah, (2024) juga menjelaskan bahwa penyajian laporan harus secara tranparan, akurat, dan tepat waktu karena berperan penting dalam mengurangi resiko penyalahgunaan dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Sehingga hipotesis 1 terbukti kebenarannya.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Sehingga hipotesis 2 terbukti kebenarannya.
3. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Sehingga hipotesis 3 terbukti kebenarannya

SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sekecamatan polanharjo
 - a. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seluruh Kecamatan Polanharjo meningkat, maka desa seluruh Kecamatan Polanharjo sebaiknya semakin melakukan evaluasi atas kinerja keuangan dengan cara melakukan evaluasi atas kinerja selama setiap semester atau triwulan.
 - a. Desa seluruh Kecamatan Polanharjo sebaiknya selalu melakukan perumusan rencana keuangan sehingga selalu optimal dalam perumusan rencana keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Kepada peneliti selanjutnya, bila akan melakukan penelitian yang sama diharapkan menambah variabel seperti pendidikan, pemerintahan, instansi atau Perilaku Keuangan.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Peneliti tidak menggunakan variabel kontrol
2. Penelitian ini terfokus hannya pada bagian – bagian penting menyangkut keuangan pemerintah desa.
3. Penelitian ini dilaukan setelah dilantiknya pemimpin negara sehingga data atau jawaban yang dipakai oleh responden penelitian juga terfokus pada program- program baru yang telah direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, Dedi Sufriadi, & Danil Yuli Fandi. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana APBG (Studi Kasus di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunangan Timur Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 68–75. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.3885>
- Arfiansyah dan Mufti Arief. (2020). “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Islam*. Vol 3.1 :67 -82.
- Aziz, Nur, and Prastiti. (2019). "Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa." *Jurnal Akuntansi Aktual* 6.2 : 334-344.
- Kurniawan, Dika, Rahayu dan Sri. (2019) “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Sekda Kota Mataram)” *Jurnal Management* 6.1: 705-714.
- Karyadi, and Muh. (2021). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa” *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 33-46.
- Madjojo dan Dahlan. (2020). “Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou” *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol 2.2 :187.
- Marlina, Evi, Rahmayanti, Sri Fitri dan Ameilia Dwi Rur Afdilah. (2021) “Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau” *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 11.1: 89-100.
- Musyafa dan Ahmad. (2022). “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru.” *Jurnal Visi Manajemen* 6.1 : 51-65.
- Ningsi, S. W., Muhammad, I., & Zakaria, B. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Aktiva*; Vol 7 No 1: 26-35 ; 2086-9169.
- Nursin, Syamsuddin, And Nirwana. (2022). “Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi” *Owner* 7.1 : 77-101.
- Oktaviakansa dan Habibi. (2023). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung” *Ekonomi* 1-23.
- Pahlawan, Wahyuning, Wijayanti, and Suhendro. (2020). "Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa." *Indonesia Accounting Journal* 2.2 : 162-172.
- Panjaitan, Ratih S, Simanjuntak, Arthur, Sembiring, Yosephine N, Benyamin Siahaan, Septony. (2022). “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Dana Desa. (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Pars)” *Jurnal Manajemen* 8.1: 51-70.

- Panjaitan, Ratih S, Simanjuntak, Arthur, Sembiring, Yosephine N, Benyamin Siahaan, Septony. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Dana Desa. (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Pars). *Jurnal Manajemen* 8.1: 51-70.
- Putri, Zulia, and Prasiwi. (2021). "Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa." *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 18.2 : 1-12.
- Puspa, and Prasetyo. (2020). "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Desa" *Akuntansi, Auditing & Informasi*. Vol 20.2 : 281-298.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Ridwan, Santoso, Suharto, Sulisty And Anindya. (2023). "Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi pengelola , Sistem pengendalian internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 12. 1 : 92.
- Riski, Amalia, And Maryono. (2022). "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15.1: 122:133.
- Salsabila. (2022). "Pengaruh Aparatur Desa, Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" *repository.unissula.ac.id*
- "Determinan Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Transparansi" *management*. 14
- Syahputra, M. Irvan. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis. Diss. Universitas Islam Riau. *repository.uir.ac.id*
- Syahrul Syarifudin & Neni Nurhayati, Repitamala. (2020). "engaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 5.2: 14-23.
- Tanjung, A. S., Purba, A. M., & Muhammad, M. (2022). Pemahaman terhadap Teori-Teori Organisasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 5816-5823.
- UUD RI NO. 28. (2024). Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan.
- Wijayanti dan Suhendro. (2020). "Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa" *Akuntansi Indonesia*. 2.2: 162-172.